

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
2013 - 2018**



**DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI BALI**

KATA PENGANTAR

“Om Swastyastu”

Dengan menghaturkan puja pangastuti angayubagia dihadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, kami telah dapat menyusun Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2013-2018.

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2013-2018 merupakan penyempurnaan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Bali 2013-2018 yang telah disusun sebelumnya dengan menyesuaikan *cascading* hasil asistensi dengan pihak dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Birokrasi Pemerintah RI.

Dalam pengelolaan pemerintahan, Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Bali ini akan menjadi pedoman dan sebagai pegangan oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan kebudayaan Bali.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kerja samanya sehingga dapat tersusun Revisi Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Bali ini.

Sekian dan terima kasih.

“Om Santih, Santih, Santih Om”

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI BALI,

DRS. DEWA PUTU BERATHA, M.SI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19581231 198002 1 011

Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Nomor: 028/101/DISBUD tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2013 – 2018

KATA PENGANTAR.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN.....	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	6
2.2 Sumber Daya.....	9
2.3 Kinerja Pelayanan.....	9
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	12
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	17
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	17
3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	21
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	22
4.1 Visi.....	22
4.2 Misi.....	22
4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	23
4.4 Strategi dan Kebijakan.....	24
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	25
5.1 Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja.....	25
5.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.....	28

BAB VI	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	29
BAB VII	PENUTUP.....	30

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

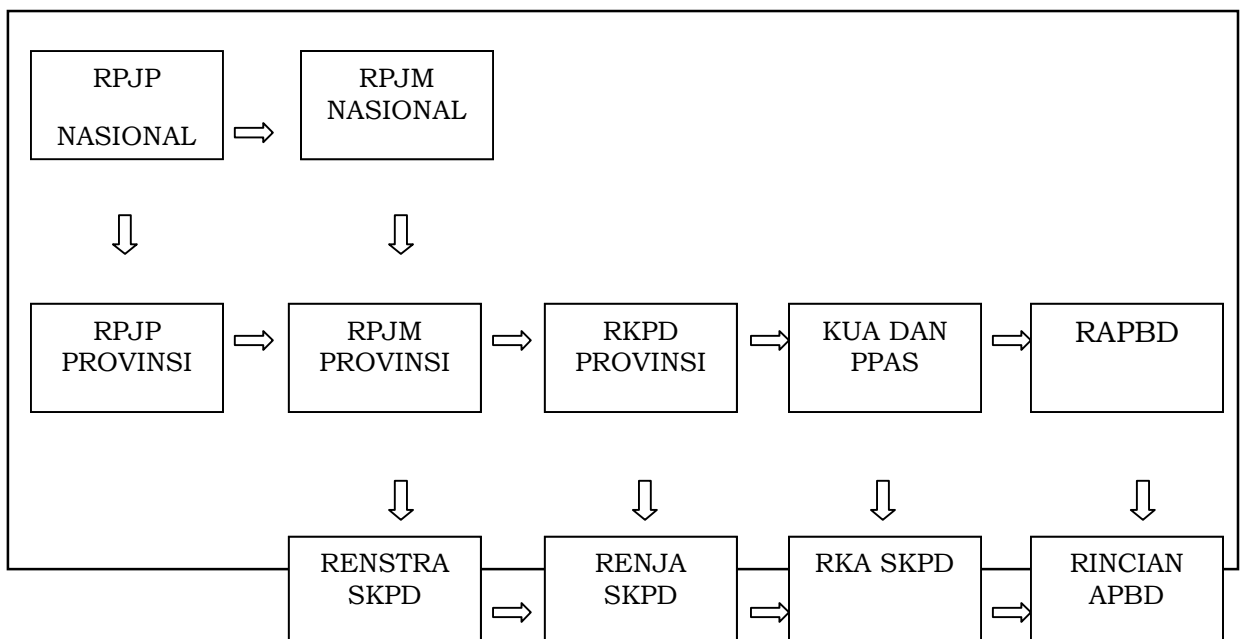
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan Provinsi Bali adalah merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-2018, yang secara lebih khusus memuat tentang kebudayaan dan sekaligus berfungsi sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan di bidang kebudayaan.

Untuk penyelenggaraan pemerintah daerah yang birokratis desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan akuntabilitas pada seluruh jajaran lembaga pemerintah agar dalam melaksanakan tugas pokok sebagai pelayan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itulah diperlukan satu penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sebagai tolak ukur akuntabilitas dan pertanggungjawaban kepada publik.

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2013-2018 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi penyusunan program, kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan tahunan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Di samping itu Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2013-2018 merupakan tolak ukur penilaian kinerja SKPD.

Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2013-2018 disusun berdasarkan atas RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-2018 khususnya bidang kebudayaan. Selanjutnya Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Bali akan menjadi acuan dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

Gambar 1. Keterkaitan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2013-2018 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman

Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 77 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2013-2018 dimaksudkan sebagai upaya untuk :

- Menjabarkan visi, misi dan program/kegiatan SKPD ke dalam rencana program/kegiatan periode 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif;
- Menjabarkan kebijakan program/kegiatan jangka panjang SKPD;
- Mensinergikan dan menyelaraskan kebijakan program/kegiatan baik ditingkat pusat maupun di daerah, serta aspirasi masyarakat.
-

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2013-2018 adalah :

- Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, serta menyediakan acuan resmi dalam penyusunan Renja SKPD sekaligus acuan penentuan pilihan-pilihan program/kegiatan tahunan;
- Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi, dan sinergi baik antar ruang, antar waktu, antar fungsi SKPD maupun antara Pusat dan Daerah;
- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- Memudahkan seluruh jajaran SKPD untuk memahami dalam menentukan program/kegiatan yang nantinya diukur dengan indikator-indikator;

- Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Mengacu pada maksud dan tujuan tersebut, maka Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2013-2018 mempunyai fungsi pokok sebagai acuan dalam penyusunan Renja SKPD, merumuskan visi dan misi SKPD dan sasaran yang akan dicapai, serta perumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam bentuk program/kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2014-2018.

1.4 Sistematika

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2013-2018 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan susunan adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra, Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan

Merupakan diskripsi atau penjelasan yang memuat Tugas, Fungsi Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan Peluang Pengembangan Pelayanan.

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Memuat isu-isu Strategis dan Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan ke depan berdasarkan Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Memuat rumusan pernyataan terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan.

BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Memuat mengenai Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VI Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Memuat mengenai Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII Penutup

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sebagai lembaga teknis yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 77 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Kebudayaan sebagai Dinas Teknis Daerah yang mempunyai Tugas Pokok; Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang kebudayaan dan melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan di bidang kebudayaan yang diberikan oleh Gubernur, hal ini menjadikan kekuatan Dinas Kebudayaan dalam menentukan arah dan kebijakan serta sasaran makro dalam rangka pembinaan dan pengembangan kebudayaan daerah Bali.

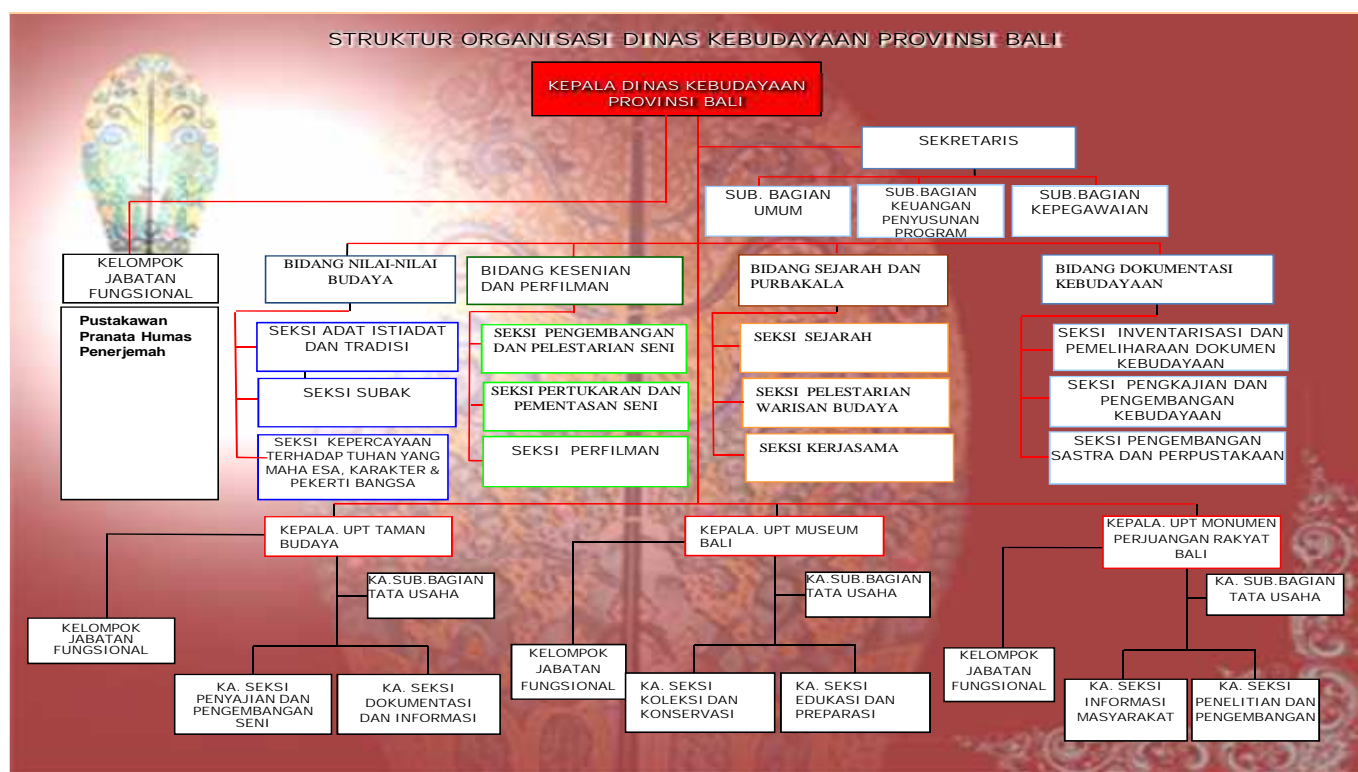
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali merupakan salah satu Dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Bali yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi di bidang kebudayaan. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat dan 4 (empat) Bidang serta 3 (tiga) Unit Pelayanan Teknis serta Kelompok Fungsional, yaitu :

1. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program
 - c. Sub Bagian Kepegawaian
2. Bidang Dokumentasi Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Inventarisasi dan Pemeliharaan Dokumen Kebudayaan
 - b. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Kebudayaan
 - c. Seksi Pengembangan Sastra dan Perpustakaan
3. Bidang Nilai-Nilai Budaya, terdiri dari :
 - a. Seksi Adat Istiadat dan Tradisi
 - b. Seksi Subak
 - c. Seksi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Karakter dan Pekerti Bangsa
4. Bidang Sejarah dan Purbakala, terdiri dari :
 - a. Seksi Sejarah
 - b. Seksi Pelestarian Warisan Budaya
 - c. Seksi Kerjasama
5. Bidang Kesenian dan Perfilman, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan dan Pelestarian Seni
 - b. Seksi Pertukaran dan Pementasan Seni
 - c. Seksi Perfilman
6. UPT. Taman Budaya, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Penyajian dan Pengembangan Seni
 - c. Seksi Dokumentasi dan Informasi

7. UPT. Museum Bali, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Koleksi dan Konservasi
 - c. Seksi Edukasi dan Preparasi
8. UPT. Monumen Perjuangan Rakyat Bali, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Informasi Masyarakat
 - c. Seksi Penelitian dan Pengembangan
9. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor : 77 Tahun 2011, tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi dan Tata Perangkat Daerah, sebagaimana Gambar 2.

Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Bali



Dinas Kebudayaan dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang penggalian, pelestarian, pengembangan termasuk pemberdayaan masyarakat melakukan langkah-langkah, diantaranya :

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja dinas;
2. Merumuskan kebijakan umum dinas serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
3. Melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis di bidang kebudayaan;
4. Melakukan advokasi kepada lembaga kepercayaan terhadap TYME;
5. Melaksanakan pembinaan lembaga adat;
6. Melaksanakan promosi dan pementasan budaya;
7. Melaksanakan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional

- serta revitalisasi dan kajian seni tingkat provinsi;
8. Melakukan kerja sama di bidang kebudayaan baik dalam negeri maupun luar negeri;
 9. Melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan produksi dan peredaran perfilman;
 10. Melakukan upaya perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan warisan budaya;
 11. Memberikan rekomendasi atas penggunaan/pemanfaatan warisan budaya;
 12. Melakukan penginventarisasian, pengkajian, publikasian, pendokumentasian budaya Bali.

Dalam rangka melaksanakan tugas bidang perencanaan, penetapan kebijakan dan strategi pembangunan kebudayaan, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan kebudayaan;
2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan strategi pembangunan kebudayaan Provinsi Bali;
3. Pengawasan/monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kebudayaan Provinsi Bali;
4. Pelaksanaan program yang bersifat tambahan yang ditugaskan oleh Gubernur.

2.2. Sumber Daya

Kuantitas SDM di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali guna mendukung operasional instansi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah relatif memadai yang tersebar di Dinas maupun UPT.

Kerja sama yang baik dengan para stakeholder budaya seperti para seniman, budayawan, lembaga-lembaga tradisional seperti Desa Pakraman, Subak maupun lembaga-lembaga semiformal independen dan lembaga formal seperti Listibya, Widyasabha, MUDP, ISI, Balai Arkeologi, Balai Bahasa, BPCB, BPNB serta hubungan yang terjalin baik dengan instansi terkait seperti Dinas Pariwisata, Kementerian Agama, Fakultas Sastra dan Budaya UNUD, Kedubes RI di Luar Negeri, serta Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota se-Bali maupun negara-negara sahabat merupakan satu kekuatan besar dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok sehingga lebih memudahkan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Kebudayaan.

2.3. Kinerja Pelayanan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan maka capaian kinerja yang direncanakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penghargaan Terhadap Budaya dan Sejarah Bali, melalui :

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, melalui kegiatan :

- a. Pekan Apresiasi Budaya dan Pameran Museum Tk. Kabupaten

- b. Pengadaan Bahan Informasi Museum
- c. Pengadaan Buku Informasi Monumen Perjuangan Rakyat Bali
- d. Pameran Museum Perjuangan

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Budaya, dengan kegiatan :

- a. Pekan Apresiasi Budaya dan Pameran Museum Tk. Nasional.
- b. Sosialisasi Museum

Program Pengelolaan Keragaman Budaya, melalui kegiatan :

- a. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Koleksi Buku/ Naskah Kuno
- b. Parade Sastra Dalam Rangka Pembinaan Seni Sastra.
- c. Pembinaan Bahasa/ Penyuluhan Bahasa dan Sastra.
- d. Pelaksanaan kegiatan Badan Pembina Bahasa Aksara dan Sastra Bali di Provinsi Bali.
- e. Sosialisasi Nilai-Nilai Perjuangan Rakyat Bali

2. Meningkatkan Apresiasi Seni dan Kreatifitas Karya Budaya

Program Pengembangan Nilai Budaya, melalui kegiatan:

- a. Pesta Kesenian Bali
- b. Penghargaan Seni Dharma Kusuma
- c. Pembinaan dan Pemantauan Pementasan Seni
- d. Bantuan seksi - seksi dalam PKB
- e. Fasilitasi pelaksanaan bantuan hibah kelompok masyarakat dalam rangka peningkatan aktifitas adat , sosial budaya dan agama.

Program Pengelolaan Keragaman Budaya, melalui kegiatan :

- a. Peragaan dan Pementasan Seni Budaya (Bali Mandara Mahalango)
- b. Pengadaan Buku Kalender of Event Taman Budaya
- c. Pengadaan Master Multimedia Inetraktif Taman Budaya
- d. Pengadaan Buku Informasi Taman Budaya
- e. Pemberian dukungan, Penghargaan dan kerjasama di bidang budaya.
- f. Pengadaan Cinderamata Taman Budaya (cuma 2014)
- g. Pelatihan dan Pendidikan seni Budaya
- h. Sarasehan Seni Budaya
- i. Pendokumentasian Kesenian Khas Daerah dan Pendataan Sanggar Seni di 9 Kab/ Kota
- j. Lomba Makendang Bapang Barong

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, melalui kegiatan :

- a. Lomba tari
- b. Pelatihan tari kreasi
- c. Temu Budaya Nasional
- d. Garapan Tabuh dan Tari Kreasi
- e. Pameran Seni Rupa Lukis Kontenporer
- f. Pekan Komponis dan Koreografi Muda se-Bali
- g. Pementasan Rutin Kesenian Kab/ Kota se-Bali
- h. Paket khusus Pementasan Seni di Luar Daerah
- i. Festival Cak Durasim
- j. Rencana Penyusunan Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK BLUD)

Program Kebudayaan Tingkat Nasional, melalui kegiatan :

- a. Festival Nasional Kesenian
- b. Festival Seni Tradisi se-Anggota MPU
- c. Parade tari Nusantara
- d. Dukungan Penampilan Seni Budaya
- e. Pesona Budaya Provinsi Bali
- f. Diplomasi Kebudayaan

Program Kerja Sama Informasi Dengan Mass Media, melalui kegiatan :

- a. Pembuatan Film Budaya Bali.
- b. Festival Film Bali.

3. Meningkatkan Pelestarian Nilai Budaya dan Warisan Budaya Bali.

Program Pengembangan Nilai Budaya , Melalui kegiatan :

- a. Inventarisasi Cagar Budaya
- b. Penyelenggaraan Penyerahan Bantuan Hibah dan BKK Desa Pakraman di 9 Kab/ Kota
- c. Penyelenggaraan Penyerahan Bantuan Hibah dan BKK Kepada Subak dan Subak Abian di 9 Kab/ Kota
- d. Pembinaan dan Lomba Desa Pakraman
- e. Pembinaan dan Lomba Subak dan Subak Abian
- f. Utsawa Dharma Gita
- g. Pelatihan Juri Utsawa Dharma Gita
- h. Penelusuran dan Penyusunan Purana Pura
- i. Pembuatan direktori desa pakraman, subak dan subak abian.
- j. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga adat.
- k. Verifikasi, Eksistensi, Monitoring dan Evaluasi LPJ Hibah di Kab/Kota
- l. Pelaksanaan kegiatan Majelis Pertimbangan dan Pembinaan

Kebudayaan (Listibya) Provinsi Bali.

- m. Pelaksanaan Kegiatan Word Hindu Parisad
- n. Pelaksanaan Kegiatan Tri Hita Karana.
- o. Pelaksanaan Kegiatan Sabha Budaya Hindu Bali

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, melalui kegiatan :

- a. Pemeliharaan dan Reinventarisasi Koleksi
- b. Pemeliharaan dan Perawatan Dokumentasi Budaya
- c. Perawatan Koleksi Benda Seni
- d. Identifikasi dan inventarisasi hasil karya budaya masyarakat Bali
- e. Pengelolaan Warisan Budaya Dunia.
- f. Kajian dan Dokumentasi Sastra kuno Bali Dalam Seni Pertunjukan
- g. Alih Aksara dan Alih Bahasa Naskah atau Lontar Bali

Program Keragaman Budaya, melalui kegiatan :

- a. Reproduksi Lontar dan Naskah Kuno.

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya, melalui kegiatan:

- a. Pelaksanaan Kegiatan Himusba.

Program Kebudayaan Tingkat Nasional, melalui kegiatan :

- a. Sarasehan Benda Cagar Budaya (Rapat Kerja dan Koordinasi Bidang Kebudayaan Sekber MPU

Program Penerangan Bimbingan dan Kerukunan Hidup Beragama, melalui kegiatan :

- a. Darma Santhi Hari Raya Nyepi

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media, melalui kegiatan :

- a. Sosialisasi Keberadaan Organisasi Kepercayaan Terhadap TYME
- b. Pendataan dan inventarisasi Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- c. Pembinaan Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan Permasalahan dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan Bali mencakup antara lain :

1. Bidang Identitas (Agama, Bahasa dan Jati Diri Manusia Bali)
2. Bidang Peradaban (Arsitek, Gender, Pendidikan dan Generasi Muda)
3. Bidang Ekonomi (Pariwisata, Industri Kecil, Pertanian dan Lingkungan Hidup)
4. Bidang Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dan Kependudukan
5. Bidang Kawasan dan Kesucian Pura, Benda Kepurbakalaan/Situs Sejarah Bali, Pelestarian dan Kearifan Lokal.

Dalam pencapaian visi dan misi, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali melakukan analisis faktor lingkungan internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan serta faktor lingkungan eksternal yang terdiri dari peluang dan tantangan.

A. Faktor Lingkungan Internal

1. Kekuatan

Kebudayaan daerah yang dijiwai oleh Agama Hindu adalah sosok kebudayaan yang hidup, tumbuh dan berkembang yang tersusun atas komponen fisik, struktur dan inti kebudayaan yaitu sistem nilai yang bersumber dari Agama Hindu. Hal ini berarti Agama Hindu menjiwai kebudayaan Bali dan kebudayaan Bali mewarnai

Agama Hindu, hal ini berarti bukan saja memantapkan bobot kualitatif namun juga menyebabkan makna spiritualitas yang berfungsi bagi keberdayaan budaya dan sekaligus bagi ketahanan kebudayaan Bali.

Kekuatan keberdayaan budaya Bali dapat diformulasikan dari struktur dan pengalaman sejarahnya, antara lain;

- a. Dalam keterbukaan dan komunikasinya dengan unsur-unsur asing, kebudayaan Bali memperlihatkan diri sebagai sistem yang penuh vitalitas, selektif dan adaptif;
- b. Kebudayaan Bali merupakan satu sistem yang unik dengan identitas yang jelas;
- c. Kebudayaan Bali memiliki landasan etika dan estetika yang kuat;
- d. Kebudayaan Bali adalah satu sistem yang dinamik;
- e. Kebudayaan Bali memiliki akar dan daya dukung lembaga-lembaga tradisional yang kokoh seperti desa Pakraman, Subak dan Subak Abian, dan Sekaa-Sekaa;
- f. Kebudayaan Bali memperlihatkan kekayaan yang variatif serta kaya akan konsep-konsep yang dipakai sebagai landasan pembangunan daerah Provinsi Bali seperti konsep Tri Hita Karana dan Tri Mandala

2. Kelemahan

- a. Sarana dan prasarana yang belum lengkap sebagai pendukung operasional kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Bali seperti kendaraan operasional, perangkat komputer serta alat-alat perlengkapan kantor lainnya dirasa belum cukup memadai. Walaupun sudah ada gedung-gedung yang representatif namun piranti serta alat-alat kerja kantor penunjang operasional belum lengkap. Hal ini dapat menghambat proses mewujudkan visi dan misi.

- b. Kualitas SDM, dengan jumlah pegawai yang ada di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dapat dikatakan memenuhi standar secara kuantitas namun dari segi kualitas masih dirasa sangat kurang. Jumlah keseluruhan pegawai yang berpendidikan sarjana lebih dari 50 % namun pegawai yang berlatar belakang pendidikan di bidang kebudayaan masih sangat kurang. Di samping itu pegawai yang berkualitas menurut manajemen SDM adalah pegawai yang mempunyai multi skill, berwawasan ke depan (visioner), serta mampu beradaptasi dengan lingkungan, tapi kenyataan hal tersebut belum bisa terwujud

B. Faktor Lingkungan Eksternal

1. Peluang :

- a. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan kemandirian daerah. Jelas pada pokoknya Undang-Undang Pemerintahan Daerah bertujuan memberdayakan masyarakat yang memerlukan kesiapan, baik di daerah Provinsi dan terlebih lagi di daerah Kabupaten/Kota sehingga mampu menumbuhkembangkan dan memanfaatkan segala peluang yang ada.
- b. Keberadaan kebudayaan Bali berpeluang untuk tumbuh dan berkembang secara dinamik dan terkait dengan komunikasi yang terbuka secara lintas budaya pada skala Nasional dan global (keberadaan horisontal) dan peluang untuk tumbuh dan berkembang karena dorongan dan energi internal baik melalui mekanisme evolusi kebudayaan maupun fenomena Balinisasi dalam kerangka paradoks globalisasi (keberadaan vertikal). Keberadaan budaya Bali masa depan (abad XXI) terbuka melalui lima saluran; Saluran Diplomasi Kebudayaan; Saluran Pengembangan Kebudayaan Nasional; Saluran Pariwisata (Pariwisata Budaya); Saluran Iptek (Teknologi Multi Media); Saluran Industri yaitu industri budaya.
- c. Respon masyarakat terhadap keberadaan Dinas maupun terhadap operasional dan program kerja Dinas Kebudayaan sangat baik terbukti dari antusiasme masyarakat Bali maupun

masyarakat luar terhadap kunjungan ke perpustakaan Dinas Kebudayaan yang membuktikan hausnya akan kebutuhan informasi budaya, perhatian dan respon masyarakat terhadap pagelaran seni daerah Bali baik di dalam maupun di luar negeri, serta partisipasi dalam mendukung pengembangan dan pelestarian budaya merupakan satu peluang yang sangat bagus untuk mengembangkan visi dan misi instansi.

2. Tantangan

a. Tantangan dan ancaman terhadap ketahanan dan keberadaan kebudayaan Bali dapat berasal dari dalam yang terkait dengan transformasi agraris-industri; banyaknya alih fungsi dan penggunaan lahan mengancam keberadaan lembaga tradisional subak seiring dengan berubahnya budaya masyarakat Bali dan masyarakat agraris menjadi masyarakat industri akibat modernisasi. Transformasi budaya yang bersifat negatif seperti komersialisasi, individual, material yang membawa kedangkalan dan merapuhnya dasar-dasar moral dan landasan batiniah masyarakat Bali.

b. Tekanan globalisasi dan dampak pariwisata di Bali serta tuntutan ekonomi seringkali memperlakukan kebudayaan sebagai obyek yang dalam berbagai fenomena harus direkayasa, seperti misalnya kesenian tradisional yang disakralkan menjadi dikomersilkan karena untuk keperluan pementasan pariwisata. Ini menjadi ancaman yang sangat besar bagi terwujudnya kelestarian dan keberdayaan kebudayaan Bali.

c. Ciri kebudayaan terbuka dengan disertai sikap masyarakat yang terlalu permisif terhadap masuknya budaya baru dapat melemahkan sendi-sendi pokok pendukung keberadaan kebudayaan. Kondisi transformatif dapat mengakibatkan posisi sistemik atau unsur-unsur kebudayaan tertentu labil seperti unsur bahasa Bali yang sudah semakin jarang dipakai oleh masyarakat. Dijinkannya pembangunan gedung-gedung yang

semakin menggeser seni arsitektur tradisional Bali maupun penyerapan dan penggunaan budaya-budaya luar dalam kehidupan masyarakat Bali yang mengakibatkan kecenderungan masyarakat yang mulai meninggalkan nilai-nilai budaya tradisional Bali. Sikap masyarakat seperti ini dapat menjadi ancaman dalam mewujudkan visi dan misi.

Terbatasnya kreator kebudayaan; tantangan dan ancaman keberdayaan kebudayaan Bali abad XXI adalah terbatasnya sumber daya manusia secara individual maupun kolektif bagi

penciptaan dan pengembangan kreasi yang bermutu tinggi (Master Piece). Jumlah dalang, undagi, sekaa seni seperti Arja, Gambuh dan lain-lain semakin langka.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Sistem kemasyarakatan merupakan perwujudan tingkah laku yang berpola, yang diatur oleh sistem norma dan peralatan guna memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Beberapa sistem kemasyarakatan yang terkait dengan kebutuhan manusia secara umum antara lain : pranata yang berhubungan dengan kekerabatan seperti soroh; pranata yang terkait dengan kebutuhan ekonomi (economic institutions) seperti koperasi, pasar; pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan (education institutions) seperti pendidikan formal dan non formal; pranata yang berhubungan dengan keagamaan (religious institutions) seperti pura, masjid, gereja dan wihara; pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terkait dengan kesenian dan rekreasi (aesthetic and recreational institutions) seperti seni suara, seni tari, seni karawitan, dan olah raga.

Dalam kehidupan masyarakat Bali pada umumnya, sistem kemasyarakatan yang terbentuk guna memenuhi kebutuhan individu maupun kelompok terakomodasi dalam dua lembaga kemasyarakatan yaitu lembaga yang menangani masalah kedinasaan dan lembaga adat yang mengatur tentang keadatan dan tradisi yang berlaku di desa-desa.

Di Bali dikenal dengan adanya sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan dua pengertian. Pertama, sistem pemerintahan desa pakraman atau desa adat, dan kedua sistem pemerintahan desa dinas yaitu desa sebagai satu kesatuan wilayah secara struktural berada di bawah kecamatan dalam sistem pemerintahan RI yang berfungsi dalam kehidupan formal.

Desa Pakraman atau desa adat di Provinsi Bali mempunyai identitas, eksistensi, peranan dan kewajiban-kewajiban yang dibangun atas dasar konsep *Tri Hita Karana* yaitu unsur *Parhyangan* (keterikatan terhadap tempat pemujaan yang sama), unsur *Pawongan* (keterikatan antar sesama warga atau krama adat khususnya yang beragama Hindu), dan unsur *Palemahan* (keterikatan terhadap wilayah teritorial).

Dalam satu desa dinas dapat terbagi atas beberapa desa pakraman. Begitu juga dalam satu banjar dinas dapat terdiri atas lebih dari satu banjar adat. Kebalikannya dapat terjadi dimana dalam satu desa pakraman dapat terdiri lebih dari satu desa dinas.

Adat istiadat dan pola kebiasaan yang menjadi tradisi dan berlaku di desa-desa di Bali pada umumnya hampir sama. Masyarakat Bali mempunyai nilai budaya, sistem norma dan kebiasaan yang dihormati dan disepakati oleh setiap warga, baik yang tertulis berupa awig-awig ataupun ketentuan yang tidak tertulis (*pararem*) sesuai *desa kala patra* dan *desa mawacara*. Adat istiadat yang berlaku terkait erat dengan agama yang dianut oleh masyarakat setempat dan diwarisi secara turun temurun.

Bagi masyarakat Hindu di Bali, agama dan kebudayaan memiliki keterkaitan yang harmoni sebagai landasan dalam kehidupan masyarakat Bali. Aturan-aturan atau konsepsi-konsepsi yang mengatur kegiatan manusia dalam kaitannya dengan interaksi manusia dengan lingkungan alam pada masyarakat Bali yang telah dilaksanakan secara mentradisi, yaitu ;

Tri Hita Karana

Secara harfiah, konsep Tri Hita Karana berarti tiga hal yang menyebabkan kesejahteraan atau kebahagiaan yakni hubungan yang harmonis dan seimbang antara manusia dengan Tuhan (*Parhyangan*), manusia dengan sesama manusia (*Pawongan*), dan manusia dengan alam/lingkungan (*Palemahan*). Dalam kehidupan keseharian masyarakat Bali, konsep Tri Hita Karana diwujudkan dengan pura sebagai unsur *Parhyangan*, masyarakat adat atau organisasi sosial sebagai unsur *Pawongan*, dan alam atau lingkungan fisik sebagai unsur *Palemahan*. Filosofi Tri Hita Karana mengajarkan orang Bali untuk hidup yang berkeeseimbangan dan harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta ini.

Tat Twam Asi

Dalam ajaran agama Hindu dikenal konsep Tat Twam Asi yang artinya dia adalah kamu. Ajaran ini mengandung makna yang sangat dalam, bahwa setiap individu adalah sama dengan individu lain atau makhluk yang lain karena berasal dari sumber yang sama yakni Tuhan atau Brahman. Konsep Tat Twam Asi mengajarkan umat Hindu untuk saling menghormati dan menganggap eksistensi seseorang sama dengan orang lain. Selaras dengan konsep Tat Twam Asi dalam masyarakat Bali dikenal pula konsep manyama-braya yaitu saling menghormati secara vertikal (*nyama/saudara*) dan horizontal (*braya/kerabat*). Di era global sekarang ini masyarakat Bali cenderung bersifat plural dan heterogen. Nilai-nilai Tat Twam Asi dan *manyama-braya* sangat relevan untuk diimplementasikan dalam mewujudkan masyarakat multikultur, yang saling menghormati satu sama lainnya.

Rwa Bhineda

Konsep ini merupakan keyakinan masyarakat Bali bahwa di dunia terdapat dua unsur yang selalu berbeda (*oposisi binier/binary opposition*) seperti : luan-teben, kaja-kelod, suci-leteh, laki-perempuan, baik-buruk, siang-malam. Apabila dihayati, konsep tersebut mengajarkan orang Bali tentang keseimbangan dan keselarasan untuk mencapai tujuan. Dua unsur yang berbeda itu senantiasa ada dalam kehidupan dan mempunyai kedudukan yang sama, serta tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Konsep Rwa Bhineda juga mengajarkan kepada orang Bali bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang wajar.

Desa Kala Patra

Secara harfiah, konsep desa, kala, dan patra berarti tempat, waktu, dan kondisi atau keadaan. Konsep tempat/ruang, waktu, dan keadaan sangat menentukan dalam kehidupan orang Bali. Berlandaskan konsep desa, kala, dan patra, orang Bali dapat menerima perbedaan yang disebabkan oleh faktor ruang/tempat, waktu, dan keadaan atau kondisi tertentu. Hal ini menunjukkan fleksibilitas kebudayaan Bali, lebih-lebih di era global sekarang ini yang dicirikan oleh adanya pluralitas kebudayaan, multietnik, dan multikultur.

Sejalan dengan berkembangnya industri pariwisata telah terjadi perubahan yang sangat signifikan dari kehidupan dan kebudayaan masyarakat Bali. Kehidupan masyarakat Bali yang semula berbasis budaya agraris telah bergeser atau berubah ke budaya industri dan jasa. Fenomena

ini telah mempengaruhi gaya hidup dan kebudayaan orang Bali secara keseluruhan.

Dalam budaya agraris kehidupan orang Bali lebih dekat dengan alam karena mereka merasa ketergantungan dengan alam sehingga nilai-nilai Tri Hita Karana lebih menjadi acuan. Sedangkan budaya industri dan jasa sebagai representasi dari era globalisasi, manusia lebih mementingkan keuntungan/profit atau uang. Di era global sekarang ini kebudayaan Bali telah menghadapi proses komodifikasi. Pengaruh globalisasi menyebabkan masyarakat Bali cenderung memenuhi hasrat material yang berlebihan sehingga uang menjadi tujuan utama. Neoliberalisme yang berorientasi kepada pasar dan mementingkan keuntungan atau profit kini mencekoki pola pikir masyarakat Bali. Alih fungsi lahan pertanian yang diperuntukan sebagai fasilitas penunjang kegiatan pariwisata dan perumahan tampaknya tidak dapat dihindari lagi karena berubahnya orientasi orang Bali.

Di sisi lain, etos kerja orang Bali juga mengalami perubahan. Di masa lalu ketika budaya agraris masih menjadi basis kehidupan orang Bali maka sifat religiusitas orang Bali masih tinggi, demikian pula budaya ngayah masih hidup di masyarakat. Namun kini nilai-nilai spiritualitas berubah dan cenderung mengarah kepada materialisme. Orang Bali yang dulu dikenal dengan etos kerja sebagai pekerja yang ulet, rajin, dan toleran, kini telah berubah.

Masyarakat Bali dewasa ini sering mengalami konflik internal yang dipicu oleh berbagai faktor antara lain: batas desa, kuburan, dan masalah adat. Nilai-nilai baru dari budaya global yang bersifat materialistis belum sepenuhnya dipahami, dan sering kali bertentangan dengan nilai-nilai lama dan tradisi yang diwarisi oleh masyarakat Bali. Berbagai konflik internal dalam masyarakat belakangan ini perlu mendapat perhatian yang seksama dari pemerintah maupun seluruh komponen masyarakat Bali. Konflik internal perlu dicarikan solusinya agar dapat ditekan seminimal mungkin karena hal itu dapat melemahkan persatuan masyarakat Bali.

Kesenian Tradisional Daerah

Bali sangat terkenal dengan keseniannya. Berbagai jenis kesenian yang berkembang di Bali antara lain : seni tari, seni karawitan/tabuh, seni rupa (patung, ukir, lukis), dan seni drama.

Seni tari dan seni karawitan di Bali secara umum dapat dipilah menjadi tiga jenis yaitu seni wali, bebali, dan balih-balihan. Seni tari yang tergolong wali antara lain : Tari Sanghyang, Baris untuk upacara, Rejang, dan Gayung. Seni Bebali antara lain : Wayang Wong, Wayang Kulit, Barong, Joged Pingitan, dan Topeng. Sedangkan seni tari yang tergolong balih-balihan antara lain sebagai berikut : Joged Bumbung, Janger, Legong, Prembon, dan Arja.

Seni karawitan yang tergolong wali antara lain : Gong Gede, Gong Luang, dan Selonding. Seni karawitan yang termasuk ke dalam kelompok bebali antara lain: Angklung, Semara Pagulingan, Gambang, Gender Batel, dan Baleganjur. Seni karawitan yang termasuk balih-balihan antara lain : Gong Kebyar, Gong Suling, Geguntangan, Okokan, Rindik, dan Gerantang Pelog.

Para Seniman Bali senantiasa berkarya dalam mengimplementasikan hasil olah cipta, rasa, karsa, dan karya. Belakangan ini muncul berbagai persoalan di masyarakat terkait dengan hak kekayaan intelektual (property right) seniman Bali. Berbagai bentuk produk budaya diduga telah dipatenkan oleh

pihak-pihak dari luar Bali atau luar negeri. Dalam hubungan ini pemerintah perlu memberikan perlindungan terhadap hasil karya seniman Bali yang terkenal sangat kreatif. Namun seniman Bali memiliki kendala antara lain kurangnya pemahaman tentang hukum ataupun keterbatasan pendanaan untuk mengurus hak kekayaan intelektual ataupun hak paten hasil karya mereka.

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Mengingat era globalisasi saat ini yang menyebabkan tidak ada batas antar Negara, maka isu-isu strategis yang menjadi tantangan dalam pembangunan kebudayaan Bali ke depan, antara lain :

1. Peningkatan penghargaan terhadap budaya dan sejarah Bali
2. Peningkatan apresiasi seni dan kreatifitas karya budaya.
3. Peningkatan pelestarian nilai budaya, sejarah dan warisan budaya.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi

Bali merupakan sebuah pulau kecil yang terbatas dalam potensi sumber daya alam dan jumlah penduduk, namun memiliki potensi kebudayaan yang besar. Kebudayaan Bali sangat fungsional dalam kehidupan masyarakat Bali sebagai pembentuk jati diri, merupakan identitas etnik Bali yang dapat berfungsi majemuk secara lintas etnik dan lintas bangsa, bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Dalam skala Nasional, kebudayaan Bali berperan dalam ikut membangun dan memperkaya kebudayaan nasional. Dalam skala internasional kebudayaan Bali dapat berperan bagi pengembangan kebudayaan dunia melalui satu entitas warisan budaya dunia.

Dalam keberadaannya ini kebudayaan Bali patut dilestarikan dan dikembangkan secara dinamik dan berwawasan ke depan. Dalam kaitan ini agar kebudayaan Bali memiliki keberadaan yang mapan, ketahanan yang kokoh dan keberdayaan yang handal dalam menghadapi abad XXI dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi ini diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali yang bertugas mengurus pengelolaan kebudayaan Bali.

Berkaitan dengan hal tersebut agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik maka dalam lima tahun ke depan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali memiliki visi yakni :

***“TERWUJUDNYA PELESTARIAN DAN PEMBERDAYAAN BUDAYA BALI
MENUJU BALI YANG MAJU, AMAN, DAMAI DAN SEJAHTERA”***

4.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas dan guna memberi arah, tujuan yang ingin dicapai dan memberikan fokus terhadap perencanaan kebudayaan yang akan dilaksanakan, maka visi tersebut perlu dijabarkan dalam misi Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, sebagai berikut :

1. Menggali, memelihara, melestarikan dan memaknai nilai - nilai peninggalan budaya dan sejarah kepahlawanan;
2. Melestarikan dan mengembangkan kesenian Bali metaksu, dinamis dan modern serta memberdayakan sekaa - sekaa kesenian, seniman dan budayawan serta mengawasi produksi dan peredaran perfilman;
3. Menggali, memelihara, melestarikan warisan budaya yang hidup di masyarakat, memberdayakan lembaga - lembaga tradisional Bali dalam suasana aman, damai dan mendokumentasikan serta mengembangkan naskah budaya Bali.

4.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

- Misi 1 : Menggali, memelihara, melestarikan dan memaknai nilai - nilai peninggalan budaya dan sejarah kepahlawanan;
- Tujuan : Meningkatkan penghargaan terhadap budaya dan sejarah Bali;
- Sasaran : Meningkatnya penghargaan terhadap budaya dan sejarah Bali;
-
- Misi 2 : Melestarikan dan mengembangkan kesenian Bali metaksu, dinamis dan modern serta memberdayakan sekaa - sekaa kesenian, seniman dan budayawan serta mengawasi produksi dan peredaran perfilman;
- Tujuan : Meningkatkan apresiasi seni dan kreatifitas karya budaya;
- Sasaran : Meningkatnya apresiasi seni dan kreatifitas karya budaya;
-
- Misi 3 : Menggali, memelihara, melestarikan warisan budaya yang hidup di masyarakat, memberdayakan lembaga - lembaga tradisional Bali dalam suasana aman, damai dan dan mendokumentasikan serta mengembangkan naskah budaya Bali.
- Tujuan : Meningkatkan pelestarian nilai budaya, sejarah dan warisan budaya;
- Sasaran : Meningkatnya pelestarian nilai budaya, sejarah dan warisan budaya;

4.4. Strategi dan Kebijakan

1. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran misi Dinas kebudayaan Provinsi Bali, diperlukan strategi yang meliputi :

- a. Penetapan kebijakan
- b. Program dan kegiatan
- c. Sumber daya yang tersedia
- d. Kondisi lingkungan serta masyarakat yang dihadapi

Strategi ini adalah sebagai pedoman kegiatan operasional bagi setiap pelaksana kegiatan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

2. Kebijakan

Dalam pencapaian keberhasilan perencanaan di bidang kebudayaan yang berkualitas, proporsional, partisipatif dan berwawasan global maka dalam menetapkan kebijakan perencanaan dibutuhkan pemahaman dan pemaknaan kebudayaan oleh segenap aparat Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dalam melaksanakan visi dan

misi tersebut, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan upaya terhadap nilai - nilai peninggalan budaya dan sejarah Bali.
- b. Mendorong pemberdayaan kesenian daerah Bali.
- c.** Meningkatkan nilai – nilai budaya, adat serta nilai – nilai yang ada di masyarakat dalam rangka memperkuat budaya Bali.

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

Cara mencapai tujuan dari penetapan tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui program dan kegiatan pembangunan Dinas kebudayaan Provinsi Bali, sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah
11. Upacara Keagamaan
12. Rapat Kerja Sinkronisasi Provinsi dengan Kab/Kota di Bali
13. Belanja Pakaian Dinas Pelayanan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:

1. Pengadaan Kendaraan Dinas
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3. Rehab Gedung
4. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Gedung Promosi Barang Kerajinan Bali (Display Kerajinan dan display produk unggulan kab./kota se-Bali)
5. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Program Pengembangan Nilai Budaya, dengan kegiatan :

1. Pesta Kesenian Bali
2. Penghargaan Seni Dharma Kusuma
3. Bantuan Seksi-Seksi dalam rangka PKB
4. Pembinaan dan Pemantauan Pementasan Seni
5. Pelaksanaan Kegiatan Majelis Pertimbangan Kebudayaan (Listibya)

Provinsi Bali

6. Utsawa Dharma Gita
7. Pelatihan Juri Utsawa Dharma Gita
8. Penyelenggaraan Penyerahan Bantuan Hibah dan BKK kepada Desa Pakraman di 9 Kabupaten/Kota Se-Bali
9. Penyelenggaraan Penyerahan Bantuan Hibah dan BKK kepada Subak dan Subak Abian di 9 Kabupaten/Kota di Bali Se-Bali
10. Verifikasi, Eksistensi, Monitoring dan Evaluasi LPJ Hibah di Kab./Kota
11. Pembinaan dan Lomba Desa Pakraman
12. Pembinaan dan Lomba Subak, Subak Abian
13. Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Adat
14. Pelaksanaan Kegiatan World Hindu Parisad
15. Pelaksanaan Kegiatan Tri Hita Karana
16. Fasilitasi Pelaksanaan Bantuan Hibah Kelompok Masyarakat dalam rangka Peningkatan Aktivitas Adat, Sosial Budaya dan Agama
17. Penelusuran dan Penyusunan Purana Pura
18. Inventarisasi Cagar Budaya
19. Pembuatan Direktori Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian
20. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan Sabha Budaya Hindu Bali

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, dengan kegiatan :

1. Garapan Tabuh dan Tari Kreasi
2. Pameran Seni Rupa Lukis Kontemporer
3. Lomba Tari
4. Pelatihan Tari Kreasi
5. Pemeliharaan dan Perawatan Dokumentasi Budaya
6. Pemeliharaan dan Reinventarisasi Koleksi
7. Perawatan Koleksi Benda Seni
8. Pameran Museum Perjuangan
9. Penyusunan Ranperda Pelestarian Warisan Budaya
10. Pekan Apresiasi Budaya dan Pameran Museum Tingkat Kabupaten
11. Pengadaan Bahan Informasi Museum
12. Temu Budaya Nasional
13. Identifikasi dan Inventarisasi Hasil Karya Budaya Masyarakat Bali
14. Pengelolaan Warisan Budaya Dunia
15. Pekan Komponis dan Koreografi Muda Se-Bali
16. Pementasan Rutin Kesenian Kab./Kota Se-Bali
17. Paket Khusus Pementasan Seni di Luar Daerah
18. Rencana Penyusunan Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK BLUD)
19. Festival Cak Durasim
20. Kajian dan Dokumentasi Sastra kuno Bali Dalam Seni Pertunjukan
21. Alih Aksara dan Alih Bahasa Naskah atau Lontar Bali

Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dengan kegiatan :

1. Parade Sastra dalam rangka Pembinaan Seni Sastra
2. Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya
3. Pelatihan dan Pendidikan Seni Budaya
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Koleksi Buku/Naskah Kuno
5. Pengadaan Buku Informasi Taman Budaya
6. Pengadaan Buku Kalender of Event Program Kegiatan di Taman Budaya
7. Pendokumentasian Kesenian Khas Daerah dan Pendataan Sanggar Seni di Kabupaten/Kota se-Bali
8. Sarasehan Seni Budaya
9. Peragaan dan Pementasan Seni Budaya
10. Pengadaan Cenderamata Taman Budaya
11. Pengandaan Master Multi Media Interaktif Taman Budaya
12. Pembinaan Bahasa/Penyuluhan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali
13. Reproduksi Lontar dan Naskah Kuno
14. Pengadaan Buku Informasi MPRB
15. Pelaksanaan kegiatan Badan Pembina Bahasa, Aksara dan Sastra Bali Provinsi Bali
16. Lomba Makendang Bapang Barong
17. Kongres Bahasa Bali
18. Sosialisasi Nilai-Nilai Perjuangan Rakyat Bali

Program Kebudayaan Tingkat Nasional, dengan kegiatan :

1. Festival Nasional Kesenian
2. Parade Tari Nusantara
3. Dukungan Penampilan Seni Budaya
4. Pesona Budaya Provinsi Bali
5. Festival Seni Tradisi se-Anggota MPU
6. Sarasehan Benda Cagar Budaya (Rapat Kerja dan Koordinasi Bidang Kebudayaan Sekber MPU)
7. Diplomasi Kebudayaan

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya, dengan kegiatan :

1. Pekan Apresiasi Budaya dan Pameran Museum Tingkat Nasional
2. Sosialisasi Museum
3. Pelaksanaan Kegiatan Himusba Bali

Program Penerangan Bimbingan dan Kerukunan Hidup Beragama, dengan kegiatan :

1. Darma Santhi Hari Raya Nyepi

Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media, dengan kegiatan :

1. Festival Film Bali
2. Pembuatan Film Budaya Bali
3. Sosialisasi Keberadaan Organisasi Kepercayaan Terhadap TYME
4. Pendataan dan inventarisasi Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
5. Pembinaan Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

5.2. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran serta kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah maka program-program dan kegiatan disusun berdasarkan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 tahun dari tahun 2014-2018, sebagaimana Tabel 5.2 terlampir.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Untuk mencapai tujuan dan sasaran misi serta kebijakan, disusun program-program prioritas pembangunan beserta indikator kinerja diharapkan dapat tercapai pada akhir 2018.

Program-program prioritas pembangunan disajikan secara rinci dan berkesinambungan dari Indikator Kinerja SKPD mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, sebagaimana Tabel 6.1 dan Tabel 6.2 terlampir.

BAB VII

PENUTUP

Dengan telah tersusunnya Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2013 – 2018, maka akan menjadi tugas dan kewajiban semua pejabat dan staf di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali untuk dapat mewujudkan visi, misi dan tujuan maupun sasaran yang ditetapkan tentunya melalui program-program yang dirancang baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam kebijakan, program maupun dalam berbagai kegiatan perlu mendapat kajian yang cermat setiap tahunnya, sehingga nantinya tidak ada program serta kegiatan yang dilaksanakan di lapangan di luar dari materi maupun substansi yang tersurat maupun tersirat dalam Renstra ini.

Mengingat sangat kompleks serta cukup berat tugas-tugas dimaksud maka dengan aktualisasi diri (*Personal Mastery*), proses pembelajaran (*Learning Organisation*), mempunyai karakter pribadi yang baik (*Mental Model*), dapat membagi visi dengan pejabat, staf maupun yang terkait (*Share Vision*), serta dengan memakai cara berpikir yang relevan (*System Thinking*), niscaya tugas kebersamaan ini akan dapat diselesaikan dengan baik dan berhasil.

Demikian harapan kami semoga Dokumen Rencana Strategis ini dapat dipergunakan sebagai pedoman kerja bagi semua pejabat maupun staf Dinas Kebudayaan Provinsi Bali untuk kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2018. Akhirnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan maupun kekeliruan dalam penyusunan Renstra ini, maka dengan lapang dada kami senantiasa menerima saran dan kritik serta perbaikan sehingga rencana dimaksud akan semakin sempurna, mengingat Renstra ini sangat jauh dari sempurna, termasuk isu-isu di masyarakat khususnya di bidang kebudayaan semakin kompleks dan semakin meluas.